

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Akhyar Qolbi Hafifi
oby.hafifi@gmail.com
Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The globalization era has brought the business development in competing to maintain the company in addition to achieve maximum profit. In getting the maximum profit companies usually use tax avoidance ways to reduce the economic ability of the company. This research aims to examine the influence of corporate governance on avoidance the company tax in the property companies which is listed in the Indonesia Stock Exchange. Corporate Governance mechanisms in this research include managerial ownership, public ownership, board of commissioners, and audit committee. This research used a sample of 11 property companies which is listed in the Indonesia Stock Exchange, during 5 years of observation registered 55 report analyzed tool that been used in this research is multiple linear regression analysis. The result showed that the managerial ownership had no influence on the tax avoidance behavior, public ownership had a influence on the tax avoidance, independent commissioner had no influence on the tax avoidance behavior. With Adjusted R Square value of 0.183 or 18% which means that can be explained by managerial ownership variable, public ownership, board of commissioner and audit committee, the rest 81,7% explained by other variable outside this research.

Keywords: Tax avoidance, managerial ownership, public ownership, board of commissioners, and audit committee.

ABSTRAK

Era globalisasi telah membawa perkembangan bisnis dalam bersaing mempertahankan perusahaannya selain itu untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal perusahaan biasanya menggunakan cara penghindaran pajak untuk mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel 11 perusahaan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selama 5 tahun pengamatan terdaftar 55 laporan yang dianalisis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, kepemilikan publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,183 atau 18,3% yang berarti dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris dan komite audit, sisanya 81,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, Dewan Komisaris, dan Komite Audit

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi semakin berkembang, perusahaan saling bersaing untuk mempertahankan perusahaannya selain itu untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Besar kecilnya laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan seringkali menjadi tolak ukur kesuksesan suatu manajemen. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal perusahaan biasanya menggunakan cara menghindari pajak, perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin sehingga dengan melakukan pembayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suanday, 2008)

Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Di dalam perusahaan terdapat hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajer. Dalam proses memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan sering kali muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Tidak jarang mempunyai tujuan lain yang mungkin bertolak belakang dengan tujuan utama perusahaan. Perbedaan tersebut terjadi karena manajer sering melakukan hal tersebut dengan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan-keputusan didalam menjalankan kegiatan usaha seperti melakukan penghindaran pajak.

Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan mengharapkan beban pajak yang sedikit sehingga dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan, akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun manajer sebagai pengelola perusahaan tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal. Manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek. Tidak untuk jangka panjang yang diharapkan oleh pemilik saham. (Minnick dan Noga, 2010).

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Penerapan *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham serta dapat menimbulkan risiko keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Hal tersebut berarti bahwa adanya *corporate governance* yang baik akan terjadi konflik kepentingan yang bisa memberi dampak buruk bagi kinerja perusahaan (Solihin, 2008).

Usaha-usaha dalam melakukan penghindaran pajak perlu diawasi agar aktivitas tersebut tidak melanggar undang-undang. Dengan dibentuknya *corporate governance* maka dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya berkaitan dengan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan ? (2) Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan ? (3) Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan ? (4) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan ?

Sesuai rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan ? (2) Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Publik terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan ? (3) Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan ? (4) Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan ?

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan sebagai kontrak kerja antara prinsipal dan agent, yang mana satu atau beberapa prinsipal (pemilik) mendelegasi beberapa otoritas mereka untuk membuat keputusan kepada agen (manajer). Berdasarkan deskripsi tersebut, seorang manajer harus menyediakan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan kepada *owner* atau pemilik, teori keagenan juga diimplikasikan sebagai informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai principal. Manajemen sebagai agen, bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Teori agensi mengarah pada kondisi dimana sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara pemilik dan manajer. Teori agensi memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham (Solihin, 2008:119). Hal tersebut terjadi karena manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham) serta rendahnya pengawasan pemilik dalam mengawasi semua kegiatan manajer. Teori ini memberikan asumsi bahwa manajer tidak dapat sepenuhnya dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun kepentingan para pemegang saham dan teori agensi dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada.

Penghindaran Pajak

Perusahaan selalu berupaya untuk memperoleh laba yang tinggi dan meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan salah satunya melalui penghindaran pajak, dimana tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lim, (2011) menyatakan bahwa penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk menimbulkan kewajiban, untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak yang terjadi saat-saat ini, dalam undang-undang perpajakan pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan sudah dikenal peraturan *specific and avoidance rule*, akan tetapi ketentuan dalam pasal 18 tersebut tidak mungkin dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak karena semakin kompleksnya skema-skema penghindaran pajak yang digunakan.

Kepemilikan Manajerial

kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam satu perusahaan memiliki banyak saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat dipergunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan yang ada dalam perusahaan.

Kepemilikan Publik

Dalam hubungan antara *corporate governance* dan strategi pajak, struktur kepemilikan memegang peran penting. Dengan adanya kepemilikan perusahaan yang terbagi untuk para pemegang saham, akan menimbulkan adanya perbedaan kepentingan atas perusahaan antara pemegang saham itu sendiri. Kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan terjadi adanya perbedaan kepentingan diantara para pemegang saham dalam

perusahaan. Perbedaan tersebut terlihat jelas diantara dua pihak yaitu pemegang saham mayoritas (terbesar) dan pemegang saham minoritas (publik), Pemegang saham publik atau masyarakat merupakan kepemilikan saham perusahaan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dan saham yang dimiliki jumlahnya tidak signifikan, yang nilainya masing-masing kurang dari 5%. Dapat dikatakan bahwa pemegang saham publik merupakan pemegang saham dengan kekuatan minoritas dalam perusahaan.

Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan antara kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya

Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Komite Audit

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengolahan perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit bertugas untuk mewakili dan membantu dewan direksi untuk mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan pengendalian internal, dan fungsi-fungsi audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat dan pihak eksternal lain yang independen dan minimal salah seorang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan. Peran utama dan tanggung jawab.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Kepemilikan Manajerial Terhadap Perilaku penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Masalah yang sering kali muncul dalam struktur kepemilikan ini adalah konflik keagenan akibat dari perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan mengurangi kecenderungan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer karena setiap keputusan yang diambil, manajer ikut merasakan secara manfaat dari keputusan yang salah (Rahmawati, 2016)

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan

Hubungan Kepemilikan Publik Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Pemegang saham minoritas atau sering disebut sebagai pemegang saham publik, dapat diartikan sebagai representasi kepentingan salah satu *shareholder*. Yaitu masyarakat, Pemegang saham publik membeli saham perusahaan dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian yang setinggi-tingginya atas investasi mereka dengan tingkat resiko yang dapat ditolerir.

Bauwhede, W et al. (2000), yang menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang

didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham.

H2 : Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan

Hubungan Dewan Komisaris Independen Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Perusahaan

Komisaris independen memiliki peranan penting bagi perusahaan khususnya dalam pelaksanaan GCG. Dengan jumlah dewan komisaris yang semakin banyak maka fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan juga akan semakin baik. Dewan komisaris ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer, serta mewajibkan terlaksanakannya akuntabilitas. Pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan terletak pada peran komisaris independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Dengan adanya fungsi pengawasan dari dewan yang independen, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan eksekutif yang lain melakukan manipulasi laba. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Meilinda, 2016)

H3 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Hubungan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern. Tanggung jawab komite audit adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Adapun sebagai objek penelitian adalah perusahaan *property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Dalam teknik ini yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, kriteria yang digunakan sebagai berikut: (1) Perusahaan *property* yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2012-2016. (2) perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. (3) Perusahaan yang mempunyai kecukupan informasi sehingga memenuhi kriteria kecukupan data.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang dimiliki oleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak perantara.

Variabel dan Definisi Operational Variabel

Terdapat lima variabel dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut terdiri satu variabel dependen dan empat variabel independen. Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yakni :

Variabel Dependen

Penghindaran Pajak

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan menjadikan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan menggunakan proksi pengukuran penghindaran pajak berupa *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. CETR menjelaskan presentase antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. (Dyrenge, 2010)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dan seluruh modal saham perusahaan yang dikelola, sehingga pihak manajemen sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang dikelola. (Puspita, 2014)

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajemen}}{\sum \text{Saham beredar}}$$

Kepemilikan Publik

Pemegang saham minoritas atau sering disebut sebagai pemegang saham publik, dapat diartikan sebagai representasi kepentingan salah satu *shareholder*, yaitu masyarakat, terhadap perusahaan. Pemegang saham publik membeli saham perusahaan dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian yang setinggi-tingginya atas investasi mereka. (Puspita, 2014)

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\sum \text{Saham Pihak Minoritas}}{\sum \text{Saham beredar}}$$

Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki kepentingan bisnis yang substansial dengan perusahaan, sehingga tidak dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, komisaris independen harus memiliki sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. (Puspita, 2014)

$$\text{Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

Komite Audit

Berdasarkan peraturan dari OJK mensyaratkan jumlah anggaran komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 orang dari perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proporsi komite audit, yaitu perbandingan antara jumlah komite audit dengan jumlah dewan komisaris. (Silvia dan Made, 2013)

$$\text{komite audit} = \frac{\text{Anggota Komite Audit}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data untuk memecahkan masalah maupun pengujian hipotesis. Program yang digunakan untuk membantu pengolahan data ini adalah menggunakan program aplikasi SPSS versi 20.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

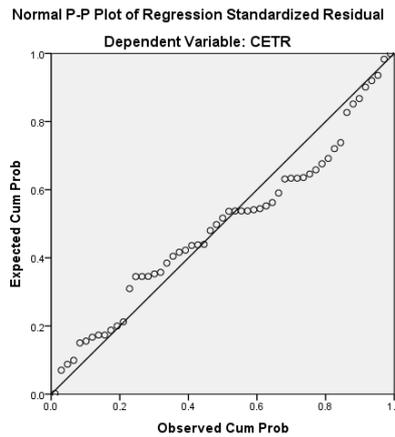
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui jumlah pengamatan yang diteliti sebanyak 55 pengamatan, berdasarkan 5 periode terakhir laporan keuangan tahunan (2012-2016), dalam statistik deskriptif dapat dilihat nilai *mean*, serta tingkat penyebaran (standar deviasi) dari masing masing tabel yang diteliti. Nilai *mean* merupakan nilai yang menunjukkan besaran 55 pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. **Analisis Statistik Deskriptif**

Tabel 1
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	55	-1.90	3.07	-.0745	.61250
KM	55	.00	1.24	.0944	.23810
KP	55	.01	16.21	.8285	2.79501
DK	55	.17	.67	.3853	.13624
KA	55	.50	1.50	.8879	.21684
Valid N (listwise)	55				

Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki *mean* sebesar .0944 dengan deviasi standar sebesar .23810, serta nilai minimum dan maksimum sebesar .00 dan 1.24, Kepemilikan Publik (KP) memiliki *mean* sebesar .8285, dengan deviasi standar sebesar 2.79501, serta mempunyai nilai minimum dan maksimum sebesar .01 dan 16.21, Komisaris Independen (KI) memiliki *mean* sebesar *mean* sebesar .3853 dengan deviasi standar .13634, serta nilai minimum dan maksimum sebesar .17 dan .67. Komisaris independen dengan rata-rata sebesar .3853 artinya jumlah komisaris independen yang berada pada dewan komisaris rata-rata sebesar 38.53%, Komite Audit (KA) memiliki *mean* sebesar .8879 dengan deviasi standar sebesar .13624 serta nilai minimum dan maksimum sebesar .50 dan 1.50.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Sumber: Data primer diolah.

Gambar 1

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Berdasarkan gambar 1 tersebut hasil *normal probability plot* dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal sehingga dapat memenuhi uji normalitas. Dengan pendekatan *Kolmogorov-smirnov test* dengan menggunakan dasar pengembalian keputusan jika hasilnya dengan nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan data normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.57419185
	Absolute	.179
Most Extreme Differences	Positive	.179
	Negative	-.153
Kolmogorov-Smirnov Z		1.331
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2001:57).

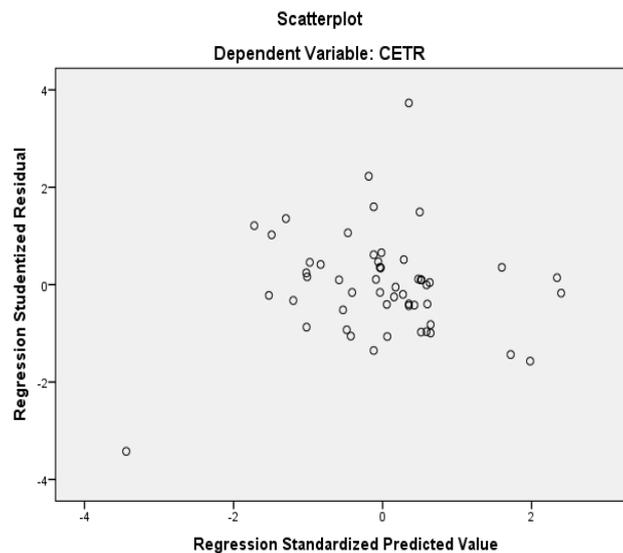
Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1	DK	.795 1.258
	KM	.850 1.176
	KP	.830 1.204
	KA	.882 1.133

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel 3 diketahui pada bagian *coefficient* diperoleh nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) untuk KM sebesar 1.176, KP sebesar 1.204, KI sebesar 1.258, dan KA sebesar 1.133. Hasil perhitungan menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai 10. Dan untuk nilai tolerance tidak kurang dari 0.10 untuk KM sebesar 0.850, KP sebesar 0.830, KI sebesar 0.795, dan KA sebesar 0.882, jadi disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer diolah.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa terlihat bahwa titik-titik tersebut menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.339	.237		1.430	.159
DK	-1.187	.473	-.360	-2.509	.015
1 KM	-.173	.600	-.040	-.289	.774
KP	.750	.327	.322	2.298	.026
KA	-.178	.191	-.127	-.936	.354

a. Dependent Variable: CETR

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$TA_per = 0,339 + (-1,187)KM + 0.750KP + (-1.187)KI + (-0.178)KA + e$$

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa kepemilikan publik (KP) memiliki perubahan yang searah terhadap arah tindakan penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan *property*.

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.005	4	.251	2.801	.036 ^b
	Residual	4.483	50	.090		
	Total	5.488	54			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KA, KP, KM, DK

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 2.801. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 5\%$), sehingga kesimpulannya model yang digunakan penelitian yang layak untuk digunakan dalam penelitian. Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tindakan penghindaran pajak perusahaan (TA_per).

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.428 ^a	.183	.118	.29943

a. Predictors: (Constant), KA, KP, KM, DK

b. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0.118. Hal ini menunjukkan hanya 11,8% variasi dari penghindaran pajak (TA_{per}) dapat dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Manajerial (KM), Kepemilikan Publik (KP), Komisaris Independen (KI), dan Komite Audit (KA) sedangkan sisanya 88,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.339	.237		1.430	.159
DK	-1.187	.473	-.360	-2.509	.015
1 KM	-.173	.600	-.040	-.289	.774
KP	.750	.327	.322	2.298	.026
KA	-.178	.191	-.127	-.936	.354

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) pada tabel 7 adalah sebagai berikut:

Untuk variabel kepemilikan manajerial diperoleh signifikansi t sebesar 0.774 > 0.05 artinya bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan *property* yang terdaftar di BEI.

Untuk variabel kepemilikan publik diperoleh signifikansi t sebesar 0.026 < 0.05 artinya bahwa variabel kepemilikan publik memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan publik berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan *property* yang terdaftar di BEI.

Untuk variabel komisaris independen diperoleh signifikansi t sebesar 0.061 > 0.05 artinya bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan *property* yang terdaftar di BEI.

Untuk variabel komite audit diperoleh signifikansi t sebesar 0.354 > 0.05 artinya bahwa variabel komite audit tidak memiliki kontribusi terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan *property* yang terdaftar di BEI.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan, pada perusahaan *property* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2012-2016. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, yang berarti bahwa besar kecilnya kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, karena jumlah yang relatif kecil dan pemegang saham pengendali lebih mendominasi setiap keputusan yang diambil perusahaan. (2) Variabel kepemilikan publik berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, yang berarti bahwa besar kecilnya kepemilikan publik pada perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Mereka berharap memperoleh pengembalian yang besar atas investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. (3) Variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, yang berarti bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal serta tidak semua dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan dalam melakukan fungsi pengawasan dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. (4) Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, yang berarti bahwa komite audit akan membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan untuk mengurangi kecurangan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : (1) Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan *property* dengan periode 4 tahun. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan waktu pengamatan, dikarenakan dengan jumlah sampel yang lebih besar dengan periode yang lebih panjang akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh generalisasi dan akan memberikan hasil yang valid atau hasil yang mendekati sebenarnya. (2) Penelitian ini menghasilkan *Adjusted R Square* yang rendah yaitu 11,8%. Hal ini menunjukkan variabel dependen lebih banyak dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain diluar penelitian ini misalnya, kepemilikan institusional, kualitas audit dan beberapa variabel pengukur lainnya, (3) Bagi para peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*) dapat memasukkan ukuran perusahaan dan rasio keuangan agar diperoleh hasil yang dapat membuktikan (*agency theory*) dengan hasil yang mendukung atau menolak teori tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauwhede, W., dan M. Willekens. 2000. *Audit quality, public ownership and firms discretionary accruals management, working paper.*
- Budiman, J. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung.*
- Dyreng, S, 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, The Accounting Review, 85, 1163-1189.*
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics.*

- Lim, Y. 2011. *Tax Avoidance and underleverage puzzle: Korean Evidence. University of New South Wales*
- Meilinda, M dan N. Cahyonowati. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2 No.2
- Minnick, K dan T. Toga. 2010. *Do corporate governance characteristics influence tax management ? Journal of corporate finance* 16 (2010)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015. Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 23 Desember 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
- Puspita, S. R. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Of Accounting*. Vol.3 No.2 Hal.1-13
- Rahmawati, A. dan W. G. Wi Endang. 2016. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Responsibility* Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 10 No. 1
- Sari, G. M. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal WRA*. Vol. 2 NO. 2
- Silvia, A dan M. G. Wirakusuma 2013. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit pada *Audit Delay*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5(2): 251-270.
- Solihin, I. 2008. *Corporate Social Responsibility from charity to sustainability*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suanday, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Salemba. Jakarta.